

KONSEPTUALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGKAT MIKRO

Hotrima Fahma¹, Siti Mauleni Hanifattul Khomairoh², Afriza³, Muhammad Amin⁴
12110320434@student.uin-suska.ac.id¹, 12110322544@students.uin-suska.ac.id², afriza@uin-suska.ac.id³, muhammadaminfst@gmail.com⁴

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, kebijakan pendidikan bertindak sebagai kerangka kerja untuk sistem pendidikan, memfasilitasi penyampaian instruksi dan mendorong inovasi sosial. Banyak elemen yang saling berhubungan, termasuk guru, siswa, tujuan pembelajaran, sumber daya, dan lingkungan, berdampak pada seberapa baik tujuan ini dicapai. Penelitian ini adalah untuk menyelidiki sifat kompleks dari kebijakan pendidikan, mengatasi masalah baru dan berkonsentrasi pada konsekuensi dan penerapan kebijakan di tingkat pendidikan dasar, terutama di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka sebagai pendekatan penelitiannya, dan data dikumpulkan dengan memahami dan memeriksa hipotesis dari beberapa sumber yang relevan. Tiga tingkat hierarkis kebijakan pendidikan ditemukan oleh penelitian: makro, meso, dan mikro. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten bertanggung jawab atas kebijakan meso, sementara pemerintah federal, dan terutama Departemen Pendidikan, bertanggung jawab atas kebijakan makro. Kebijakan mikro berpusat pada tenaga pengajar dan lembaga pendidikan seperti sekolah. Di tingkat sekolah atau lembaga pendidikan, tindakan khusus diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan tingkat mikro. Perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi siswa, manajemen kelas, pengembangan guru, partisipasi orang tua, manajemen administrasi, pengembangan sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi internal, dan pengajaran inovatif adalah beberapa fase dalam proses ini. Selain itu, visi dan tujuan, sasaran, sasaran, strategi, program, sumber daya, anggaran, pihak yang akuntabel, jadwal, dan indikator kinerja hanyalah beberapa komponen yang membentuk kebijakan pendidikan di tingkat PT/Madrasah/Sekolah. Berbagai pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk, bekerja sama dengan, dan berkoordinasi untuk melaksanakan kebijakan ini. Singkatnya, kebijakan pendidikan adalah kerangka kerja kompleks yang penting untuk mengarahkan dan mengendalikan sistem pendidikan. Mencapai tujuan pendidikan dan mempromosikan pembangunan sosial membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang efektif di semua tingkatan.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Tingkat Mikro.

ABSTRACT

To achieve national education goals, education policy acts as a framework for the education system, facilitating the delivery of instruction and encouraging social innovation. Many interconnected elements, including teachers, students, learning objectives, resources, and environment, have an impact on how well these goals are achieved. This research is to investigate the complex nature of education policy, address new problems and concentrate on the consequences and implementation of policies at the primary education level, especially in primary schools. This study used a literature review as its research approach, and data was collected by understanding and examining hypotheses from several relevant sources. Three hierarchical levels of education policy were discovered by research: macro, meso, and micro. Local governments and educational institutions at the provincial and district levels are responsible for meso policy, while the federal government, and especially the Ministry of Education, is responsible for macro policy.

Micro-policies are centered on teaching staff and educational institutions such as schools. At the level of schools or educational institutions, special measures are required for the implementation of micro-level education policies. Curriculum planning, lesson implementation, student evaluation, classroom management, teacher development, parent participation, administrative management, human resource development, internal monitoring and evaluation, and innovative teaching are some of the phases in this process. In addition, vision and goals, objectives, objectives, strategies, programs, resources, budgets, accountable parties, schedules, and performance indicators are just some of the components that make up education policy at the PT/Madrasah/School level. Various stakeholders must commit to, work with, and coordinate to implement this policy. In short, education policy is an important complex framework for directing and controlling the education system. Achieving educational goals and promoting social development requires effective policy implementation at all levels.

Keywords: Education Policy, Micro Level.

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan adalah peraturan yang mengarahkan sistem pendidikan. Seiring waktu, telah banyak kebijakan pendidikan dibuat dengan tujuan memudahkan penyelenggaraan pendidikan dan mendukung masyarakat dalam inovasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Junaid. 2019). Keberhasilan mencapai tujuan pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait, seperti pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan (Dewi, 2022). Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah suatu sistem yang terorganisir dengan subsistem-subsistem yang saling terhubung. Kinerja yang lancar dari sistem ini bergantung pada keseimbangan dan optimalitas fungsi masing-masing subsistem, sehingga ketidakseimbangan pada salah satu subsistem dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Satu prinsip yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada paragraf keempat, dengan jelas menyatakan komitmen untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Pesan ini memiliki dimensi filosofis yang signifikan dan menjadi dasar yang kuat untuk membimbing pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga yang lahir di Indonesia diharuskan menjalani proses pendidikan.

Gagasan meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, sebagaimana diungkapkan dalam amanat tersebut, diterjemahkan secara optimal melalui pendidikan, yang dijabarkan secara menyeluruh oleh K.H. Dewantara sebagai Tri Pusat Pendidikan. Konsep Tri Pusat Pendidikan ini mencakup pendidikan informal di lingkungan keluarga, pendidikan formal di lembaga sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal yang melibatkan berbagai kursus dan program pelatihan (diklat). Ketiga pusat pendidikan ini dianggap sebagai fondasi integral yang saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan pencerahan pengetahuan dan pengembangan keterampilan.

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap pesan pembukaan UUD 1945 menjadi pendorong bagi negara dan masyarakat untuk tetap berkomitmen pada penyediaan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dengan mengadopsi secara menyeluruh ketiga pusat pendidikan tersebut, diharapkan tercapainya perkembangan pengetahuan, pembentukan sikap positif, dan penguasaan keterampilan yang komprehensif bagi setiap siswa. Oleh karena itu, proses pendidikan di Indonesia diharapkan menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, berakhlak, dan siap berkontribusi dalam kemajuan bangsa.

Dalam ranah kebijakan pendidikan, terdapat tiga tingkatan yang terkait secara hierarkis: kebijakan makro pendidikan, kebijakan meso pendidikan, dan kebijakan mikro.

Kebijakan makro berada di bawah otoritas pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan. Kebijakan meso berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah dan dinas pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten. Sementara itu, kebijakan mikro berfokus pada unit pendidikan, seperti sekolah dan staf pengajar di dalamnya. Penelitian ini difokuskan pada kebijakan pendidikan dasar, terutama di tingkat sekolah dasar, sambil menyoroti sejumlah permasalahan yang muncul seiring implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang dijelaskan dalam artikel ini adalah studi pustaka, di mana data dikumpulkan dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian tersebut. Terdapat empat tahap dalam studi pustaka, yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu, dan membaca serta mencatat bahan penelitian (sesuai dengan Zed, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber dan memanfaatkan berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan Tingkat PT/Madrasah/Sekolah

Asal kata "kebijakan" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Polis," yang merujuk pada kota. Dalam konteks ini, kebijakan terkait dengan konsep pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang diterima bersama oleh pemerintah atau lembaga, dengan tujuan mencapai target tertentu. Kebijakan dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang merupakan keputusan resmi organisasi, bersifat mengikat, dan mengatur perilaku untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Sebagai pedoman utama bagi anggota organisasi atau masyarakat, kebijakan bertujuan membentuk perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai yang diinginkan. Asal kata "kebijakan" yang terkait dengan bahasa Yunani "polis" yang berarti kota, mencerminkan keterkaitannya dengan konsep pengelolaan organisasi. Kebijakan adalah proses negosiasi untuk merumuskan masalah dan metode implementasinya", (Jainurakhma, 2023: 11).

Dengan kata lain, kebijakan dapat dianggap sebagai pedoman formal yang diterima bersama, digunakan untuk mengelola dan mengarahkan aktivitas organisasi dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan (Kiwang, 2019). Tambahan dari itu, kebijakan merujuk pada langkah-langkah resmi yang diambil oleh suatu lembaga atau pemerintah guna mencapai tujuan spesifik (Junaid, 2021). Kebijakan adalah serangkaian langkah-langkah politis yang diambil dengan sengaja, didasarkan pada pemikiran yang bijaksana dan terarah, yang dilakukan oleh organisasi, lembaga, atau instansi pemerintah. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengatasi masalah tertentu dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Risnawati, 2019).

Dalam setiap aspek kehidupan, kebijakan hadir sebagai pedoman dan petunjuk untuk mengarahkan aktivitas serta membatasi perilaku agar lebih terarah dan jelas. Prinsip ini juga berlaku pada sistem pendidikan, yang dikenal sebagai kebijakan pendidikan. Isu-isu yang timbul dalam dunia pendidikan menjadi pemicu pembentukan kebijakan pendidikan. Kondisi ini muncul karena adanya ketidakselarasan antara pelaksanaan pendidikan dan tujuan pendidikan (Suyahman, 2023). Kebijakan pendidikan adalah proses yang menguraikan langkah-langkah dan tahapan pelaksanaan pendidikan melalui penjabaran visi dan misi pendidikan, dengan maksud mencapai tujuan pendidikan dalam jangka waktu tertentu (Fatkuroji, 2019).

Ada sudut pandang lain yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Kebijakan pendidikan dianggap sebagai kebijakan publik yang mengelola aspek tertentu dalam ranah pendidikan, termasuk alokasi, penyerapan, dan distribusi sumber daya untuk pelaksanaan pendidikan, serta pengaturan perilaku dalam konteks pendidikan (Bakry, 2022).

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang terkait dengan berbagai aspek pendidikan. Ini melibatkan proses merinci visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pendidikan. Kebijakan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi (PT), Madrasah, atau Sekolah merujuk pada seperangkat peraturan, pedoman, dan langkah-langkah yang dirancang untuk mengarahkan serta mengatur pelaksanaan pendidikan di tingkat tersebut.

Tujuan dari kebijakan ini adalah mencapai target tertentu dalam meningkatkan mutu dan efektivitas pendidikan di lembaga-lembaga tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai makna kebijakan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi, Madrasah, dan Sekolah:

a. Kebijakan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi (PT)

Kebijakan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi melibatkan berbagai aspek, seperti kurikulum, penelitian, penerimaan mahasiswa, sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Tujuan dari kebijakan ini mungkin mencakup peningkatan mutu pendidikan, pengembangan riset dan inovasi, peningkatan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat, dan pemenuhan standar nasional atau internasional.

b. Kebijakan Pendidikan Tingkat Madrasah

Pada tingkat Madrasah, kebijakan pendidikan dapat menekankan aspek-aspek seperti kurikulum keagamaan, pengembangan karakter dan moral, serta penguatan ajaran-ajaran agama. Tujuan dari kebijakan Madrasah melibatkan pembentukan generasi yang memiliki pemahaman agama yang baik, etika moral yang kuat, dan kemampuan akademis yang seimbang.

c. Kebijakan Pendidikan Tingkat Sekolah

Kebijakan pendidikan di tingkat sekolah mencakup regulasi mengenai kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, manajemen sekolah, dan pengembangan profesionalisme guru. Tujuan dari kebijakan ini dapat melibatkan peningkatan hasil belajar siswa, peningkatan keterlibatan orang tua, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Dalam semua tingkatan tersebut, kebijakan pendidikan bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan pendidikan nasional. Kebijakan tersebut juga dapat mencakup upaya memastikan inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan dalam akses pendidikan bagi semua individu. Kebijakan pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi (PT), Madrasah, atau Sekolah mengacu pada seperangkat aturan, pedoman, dan langkah-langkah yang dirancang untuk mengarahkan dan mengatur penyelenggaraan pendidikan pada tingkat tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam meningkatkan mutu dan efektivitas pendidikan di lembaga-lembaga tersebut.

2. Tahapan Kebijakan Pendidikan Tingkat PT/Madrasah/Sekolah

Proses dan langkah-langkah yang harus dilalui dalam pembuatan kebijakan pendidikan mencakup: merumuskan kebijakan pendidikan, memberikan legitimasi pada kebijakan pendidikan, melakukan komunikasi dan sosialisasi terkait kebijakan pendidikan, mengimplementasikan kebijakan pendidikan, menggalakkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Selain melewati tahapan tersebut, kebijakan pendidikan juga menghasilkan produk yang disebut sebagai produk-produk kebijakan pendidikan. Tahapan kebijakan pendidikan pada tingkat mikro melibatkan langkah-langkah konkret di tingkat lembaga pendidikan atau sekolah. Proses ini mencakup:

- a. Perencanaan Kurikulum, yang melibatkan penentuan materi pembelajaran dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan.
- b. Pelaksanaan Pembelajaran, melaksanakan kurikulum yang telah direncanakan dengan mengadopsi strategi pembelajaran yang efektif.
- c. Evaluasi Siswa, menilai kemajuan siswa melalui berbagai bentuk evaluasi seperti ujian, tugas, dan penilaian lainnya.
- d. Manajemen Kelas, mengelola kelas untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan memastikan keterlibatan siswa.
- e. Pembinaan Guru, yang melibatkan memberikan dukungan dan bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pemahaman terhadap kurikulum.
- f. Keterlibatan Orang Tua, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, termasuk pertemuan orang tua-guru dan kolaborasi untuk mendukung perkembangan siswa.

- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi staf pendidikan dan menyusun program pengembangan sumber daya manusia.
- h. Manajemen Administrasi, menyelenggarakan tugas administratif seperti manajemen keuangan, kepegawaian, dan pemeliharaan fasilitas.
- i. Monitoring dan Evaluasi Internal, melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran dan hasil evaluasi secara internal untuk memastikan efektivitas kebijakan.
- j. Inovasi Pendidikan, mendorong inovasi dalam metode pengajaran, teknologi pendidikan, dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tahapan ini bersifat terpadu dan saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan tingkat mikro.

3. Format Dan Implementasi Pendidikan Tingkat PT/Madrasah/Sekolah

Kebijakan pendidikan di tingkat PT/Madrasah/Sekolah (selanjutnya disebut satuan pendidikan) merupakan landasan penting dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional. Kebijakan ini diterjemahkan dalam format yang jelas dan terstruktur, kemudian diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Format Kebijakan Pendidikan Tingkat PT/Madrasah/Sekolah Kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- a. Visi dan Misi, menyatakan tujuan dan arah yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan.
- b. Tujuan, merumuskan target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.
- c. Sasaran, menjabarkan tujuan secara lebih spesifik dan terukur.
- d. Strategi, menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- e. Program, merinci kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai strategi.
- f. Sumber Daya, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program.
- g. Anggaran, menetapkan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program.
- h. Penanggung Jawab, menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
- i. Waktu, menetapkan waktu pelaksanaan program.
- j. Indikator Kinerja, menetapkan indikator untuk mengukur keberhasilan program. Implementasi Kebijakan Pendidikan Tingkat PT/Madrasah/Sekolah Implementasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan membutuhkan komitmen, kerja sama, dan koordinasi dari berbagai pihak.

Dalam proses perumusan kebijakan, tahapan krusial yang harus dijalankan adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi langkah penting dalam menjalankan kebijakan yang telah disetujui setelah melalui evaluasi berbagai alternatif kebijakan yang telah dirancang. Ketika diterapkan dalam konteks kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan mencakup penerapan kebijakan pendidikan yang telah diputuskan bersama setelah mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan pendidikan lainnya (Sulistayadi, 2020).

Pelaksanaan kebijakan pendidikan mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemangku kepentingan untuk menjalankan kebijakan, dengan maksud mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Prasojo, 2021). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan serangkaian aktivitas untuk menjalankan kebijakan yang telah disetujui, dengan maksud mencapai target pendidikan yang telah ditetapkan. Saat melaksanakan implementasi kebijakan, mungkin muncul kendala atau permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Dalam seluruh rangkaian proses perumusan kebijakan pendidikan, tahap implementasi ini dianggap sebagai fase yang lebih rumit dan kompleks, karena memerlukan kerjasama yang kokoh antara berbagai elemen, baik dari pihak pusat maupun daerah. Proses implementasi kebijakan pendidikan umumnya melibatkan empat pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan struktural. Pendekatan ini bersifat top-down, meyakini bahwa perancangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan secara struktural dan sesuai dengan tingkatan serta tahapannya (Yuliah, 2020). Dengan demikian, pendekatan struktural cenderung memiliki sifat birokratis dan kaku.
- 2) Pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan prosedural dan manajerial lebih menekankan pada penggunaan prosedur dan teknik yang tepat dalam pengembangan kebijakan daripada penataan struktur pelaksanaan (Setiyawan, 2019). Dengan demikian, pendekatan ini memerlukan pemanfaatan alat teknologi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

- 3) Pendekatan perilaku. Pendekatan ini lebih menekankan penggunaan prosedur dan teknik yang tepat dalam pengembangan kebijakan daripada penataan struktur pelaksanaan (Machali, 2018). Oleh karena itu, pendekatan ini memerlukan pemanfaatan alat teknologi dalam implementasi kebijakan.
- 4) Pendekatan politik. Pendekatan politik lebih menekankan peran faktor politik dalam memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan kebijakan Pendidikan (Hartono, 2016).

Pendekatan ini cenderung memperhitungkan realitas politik yang sedang berlangsung. Keempat pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu bijaksana dalam mengaplikasikannya agar kebijakan pendidikan dapat berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kebijakan pendidikan tingkat PT/ Madrasah/ Sekolah merupakan suatu aturan tertulis yang menjadi pedoman formal dalam pengelolaan organisasi pendidikan. Kebijakan ini berhubungan erat dengan upaya menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat, merumuskan langkah dan tahapan penyelenggaraan pendidikan, serta menangani permasalahan yang muncul di bidang pendidikan. Proses perumusan kebijakan pendidikan melibatkan tahapan seperti perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi siswa, manajemen kelas, pembinaan guru, keterlibatan orang tua, pengembangan sumber daya manusia, manajemen administrasi, monitoring, evaluasi internal, dan inovasi pendidikan. Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, empat pendekatan utama ditempuh, yakni pendekatan struktural, prosedural dan manajerial, perilaku, dan politik. Keempat pendekatan tersebut memegang peran krusial dalam menjalankan kebijakan pendidikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti struktur, prosedur, perilaku manusia, dan aspek politik yang memengaruhi pelaksanaannya. Implementasi kebijakan pendidikan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan, melibatkan kerjasama yang solid antara elemen-elemen di tingkat pusat dan daerah. Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan kebijakan pendidikan di tingkat PT/ Madrasah/ Sekolah memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan dan kualitas sistem pendidikan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1),
- Bakry, A. (2022). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*, 2(1),
- Dewi, R. (2022). Kebijakan pendidikan di tinjau dari segi hukum kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7
- Fatkuroji, F. (2019). Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02),
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01),
- Jainurakhma, J. 2023. Manajemen Pendidikan Tinggi Pasca Pandemi. Bandung: Widina.
- Junaid, H. (2016). Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 7(2),
- Junaid, H. (2019). Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 7(2),
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B., & Gana, F. (2019). Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3)
- Machali, I. (2018). Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan

- Pendidikan Islam. EL TARBAWI, 8(1),
- Prasojo, L. D. (2021). Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan*, 4(02), 1-10.
- Risnawan, W. (2019). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 511-518.
- Setiyawan, E. (2019). Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Walikota
- Sulistiyadi, H. K. (2020). Implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1-10.
- Surakarta Nomor 11A Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 122-128.
- Sutapa, M. (2008). Kebijakan pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 112408.
- Suyahman, S. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Atas Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 1047-1054.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 16-40.